

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/PRT/M/2018
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

I. TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

II. TAHAPAN PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Renstra, tahapan kegiatan yang dilalui meliputi 3 (tiga) proses sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik

Proses teknokratik dalam penyusunan Renstra adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra.

Rancangan Teknokratik Renstra dalam penyusunannya mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN, oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian tujuan RPJMN. Selain itu, Rancangan Teknokratik Renstra juga harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

2. Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra merupakan proses penyusunan Renstra yang diselaraskan dengan visi, misi, dan program

prioritas Presiden. Proses politik ini merupakan lanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan Rancangan Renstra.

3. Penetapan Renstra

Penetapan Renstra dilakukan oleh pimpinan Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja sesuai entitasnya setelah Rancangan Renstra disesuaikan dengan dokumen perencanaan entitas di atasnya.

Tahapan penyusunan Renstra untuk Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja tidak perlu melalui proses teknokratik dan politik.

III. STRUKTUR PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum dan potensi permasalahan yang dihadapi.

- a. Kondisi umum menggambarkan mengenai pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan entitas yang bersangkutan.
- b. Potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup entitas yang bersangkutan maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh dokumen perencanaan entitas di atasnya untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan visi, misi, dan tujuan. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian PUPR pada akhir periode perencanaan. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi yang berupa rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sedangkan tujuan yaitu penjabaran dari visi

Kementerian PUPR yang dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran kinerjanya.

Untuk Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja, perumusan visi, misi, dan tujuan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi entitas yang bersangkutan. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis Kementerian PUPR.

a. Arah Kebijakan dan Strategi

Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh entitas yang bersangkutan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah kebijakan dilaksanakan melalui program/kegiatan yang sesuai dengan tugas dan kewenangan entitas yang bersangkutan.

b. Kerangka Regulasi

Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi.

c. Kerangka Kelembagaan

Menjelaskan Mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi/unit kerja, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk

didalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan selama periode perencanaan

a. Target Kinerja

Terkait target kinerja dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Output Kegiatan.

b. Kerangka Pendanaan

Sedangkan terkait Kerangka Pendanaan dijelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target kinerja, meliputi sumber pendanaan APBN (Pemerintah) maupun dari pihak swasta. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang menggunakan sumber-sumber pendanaan diluar APBN (Non-APBN) seperti: PPP (KPS) dan CSR. Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari pimpinan entitas yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis entitas yang bersangkutan.

Sistematika Penulisan Renstra Kementerian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN
	2.1 Visi Kementerian
	2.2 Misi Kementerian
	2.3 Tujuan Kementerian
	2.4 Sasaran Strategis Kementerian
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
	3.3 Kerangka Regulasi
	3.4 Kerangka Kelembagaan
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	4.1 Target Kinerja
	4.2 Kerangka Pendanaan
BAB V	PENUTUP

Sistematika Penulisan Renstra Unit Organisasi

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Kondisi Umum
	1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II	TUJUAN DAN SASARAN
	2.1 Tujuan Unit Organisasi
	2.2 Sasaran Program Unit Organisasi
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi
	3.3 Kerangka Regulasi
	3.4 Kerangka Kelembagaan
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	4.1 Target Kinerja
	4.2 Kerangka Pendanaan
BAB V	PENUTUP

Sistematika Penulisan Renstra Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Kondisi Umum
	1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II	TUJUAN DAN SASARAN
	2.1 Tujuan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis
	2.2 Sasaran Kegiatan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis
- 3.3. Kerangka Regulasi
- 3.4. Kerangka Kelembagaan
- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
 - 4.1 Target Kinerja
 - 4.2 Kerangka Pendanaan
- BAB V PENUTUP

Sistematika Penulisan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Kondisi Umum
 - 1.2 Potensi dan Permasalahan
- BAB II TUJUAN DAN SASARAN
 - 2.1 Tujuan Satuan Kerja
 - 2.2 Output Kegiatan Satuan Kerja
- BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
 - 3.1 Target Kinerja
 - 3.2 Kerangka Pendanaan
- BAB IV PENUTUP

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum



Hikmad Batara Reza Lubis, SH, MH
NIP. 197908102005021001